

LAPORAN

TAHUNAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

TAHUN 2018



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA 2018**

KATA PENGANTAR



Badan PPSDMP.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) dapat menyelesaikan Laporan Tahun 2018. Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja Badan PPSDMP dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran tahun 2018 dengan membandingkan target yang telah disusun dengan capaiannya dan realisasinya. Laporan ini sekaligus menjelaskan kendala dan permasalahan serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Secara umum, target Program tahun 2018 dapat dicapai dengan baik, bahkan dalam kegiatan tertentu mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini menjadi catatan bagi Badan PPSDMP untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran tahun berikutnya.

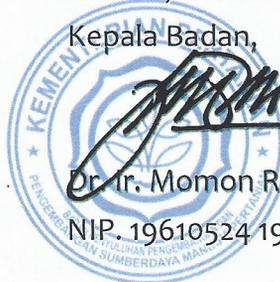
Sistematika laporan terbagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut, Bab V Kesimpulan dan Saran serta Bab VI berisi Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan sumbang saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan sangat di harapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Kami berharap, laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan PPSDMP pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018

Kepala Badan,

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS

NIP. 19610524 198603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	10
C. Output	10
BAB II. ORGANISASI.....	11
A. Dasar Hukum dan Organisasi	11
B. Keragaan Sumber daya Manusia	20
BAB III. RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	23
A. Program	23
B. Rencana Anggaran dan Kegiatan	23
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan.....	29
BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	62
A. Prmasalahan.....	62
B. Upaya Tindak Lanjut	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
BAB VI. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2018	24
Tabel 2. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	25
Tabel 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker	26
Tabel 4. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran BPPSDMP Tahun 2018	27
Tabel 5. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018...	29
Tabel 6. Realisasi Anggaran PUSAR Penyuluhan Pertanian Tahun 2018	30
Tabel 7. Realisasi Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2018.....	32
Tabel 8. Realisasi Kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2018	33
Tabel 9. Alokasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2018	35
Tabel 10. Realisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2018 ..	36
Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan Pusat Penyuluhan ..	40
Tabel 12. Target dan Realisasi Kegiatan Pusat Pelatihan.....	45
Tabel 13. Target dan Realisasi Kegiatan Pusat Pendidikan ..	54
Tabel 14. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDMP	59
Tabel 15, Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP tahun 2018.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan	21
Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Gambar 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2018.....	24
Gambar 4. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018.....	25
Gambar 5. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker Tahun 2018.....	26
Gambar 6. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Pusat Tahun 2018.....	29
Gambar 7. Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2018.....	31
Gambar 8. Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2018.....	33
Gambar 9. Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2018.....	34
Gambar 10. Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2018.....	
Gambar 11. Perkuat Kelembagaan Ekonomi Petani Kementan Bangun Pertanian Berbasis Korporasi	38
Gambar 12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Memebrikan arahan Kepada Penyuluhan Pertanian	38
Gambar 13. Penyuluh Pertanian	39

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Struktur Organisasi Badan PPSDMP.....	77
Lampiran 2.	Data Kepegawaian Badan PPSDMP.....	78
Lampiran 3.	Data Jabatan Fungsional	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tahun 2015-2019 adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari 9 Agenda Nawa Cita, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan visi Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi maka misi Kementerian Pertanian adalah: (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian menjadi tugas fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

Selaras dengan visi dan misi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tugas fungsi, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu: **"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang**

Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan”.

Upaya pencapaian visi Badan PPSDMP tersebut, dilakukan melalui misi, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
2. Memperkuat Sistem Pendidikan yang Kredibel;
3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing;
4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi BPPSDMP, tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
2. Menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda yang kompeten dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang berdaya saing dan bermartabat;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi dan manajemen.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
3. Revitalisasi STPP dan SMKPP serta sertifikasi profesi pertanian;

4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2018 adalah **(1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, serta (2) Program Pendidikan Pertanian**. Mengacu kepada Program tersebut, maka pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 Badan PPSDMP adalah melalui kegiatan:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
2. Pendidikan Pertanian;
3. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Transformasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pertanian No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Vokasi Pertanian.

Tahun 2018, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui penetapan Menteri Pertanian RI Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Penetapan, tanggal 28 Mei 2018 dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan, tanggal 7 Agustus 2018.

Arah Politeknik Pembangunan yang terbentuk saat ini, harus dapat mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045.

Selain itu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan program-program kegiatan antar lain:

(UPSUS) Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya telah menetapkan upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai

Program UPSUS sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, pemerintah telah menetapkan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan yang harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. pencapaian swasembada berkelanjutan tersebut diperlukan upaya peningkatan produksi yang luar biasa. Oleh karena itu diperlukan perhatian dari berbagai pihak, mengingat banyak kendala harus diatasi dan berbagai tantangan harus diantisipasi.

Upaya peningkatan produksi PAJALE terus digulirkan pemerintah pusat. Melalui program Upsus tiga komoditas utama padi jagung kedelai (pajale), pemerintah Presiden Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan dalam 3 tahun ini, yaitu pada tahun 2018. Pada kegiatan Upsus pajale, segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan. Upsus Pajale juga mengupayakan penyediaan dan distribusi pangan terjangkau di seluruh Indonesia.

Operasionalisasi pencapaian target di lapangan benar-benar dilaksanakan secara baik untuk mensukseskan program yaitu dengan penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya. Program Upsus dilaksanakan serentak di 31 provinsi di Indonesia.

Tentu sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi pangan nasional, salah satu di antaranya adalah pendampingan dan pengawalan. Pengawalan dan pendampingan menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani untuk dapat menyiapkan teknologi. Pengawalan dan pendampingan ini, tidak hanya dilakukan oleh para penyuluh (PNS dan THL) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) saja, melainkan mahasiswa dan penyuluh swadaya (petani) pun dilibatkan. Penyuluh, Babinsa dan mahasiswa merupakan salah satu penggerak bagi para petani sebagai pelaku utama karena dapat berperan sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator. Kegiatan pengawalan dan pendampingan inilah yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) peningkatan produksi tiga komoditas PAJALE (Pajale) dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan.

Dukungan dari TNI Angkatan Darat juga diperoleh dengan ditandatanganinya MOU antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bahwa seluruh Babinsa akan membantu petani agar program swasembada pangan ini dapat terwujud pada tahun 2017. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Pelatihan singkat diberikan kepada para Babinsa oleh para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan operasionalisasi mereka di lapangan.

(BEKERJA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kementerian Pertanian membuat gebrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa, dengan meluncurkan Program "Bekerja" atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini akan menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dengan harapan secara agregat angka kemiskinan bisa ditekan sesuai dengan target pemerintah, menjadi satu digit atau di bawah 10 persen pada 2018.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Program Bedah Kemiskinan ini adalah bagian program padat karya tunai, berbasis pada pertanian. Sektor pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sudah turun signifikan dari 10,96 persen (27,73 juta orang) pada September 2014, menjadi 10,12 persen atau 26,58 juta orang di September 2017.

Dengan skenario optimistis, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan desa dapat diturunkan menjadi 9,92 persen. Dengan kata lain, pada 2022, satu juta rumah tangga miskin dapat terentaskan kemiskinan dari posisi saat ini, yakni 3,6 juta rumah tangga.

Menteri Pertanian menegaskan program tersebut harus dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Untuk jangka pendek, tanaman sayuran bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam, misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras, seperti mangga dan salak.

Lewat Program Bekerja ini, setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing atau domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada, dan 10 batang bibit cabai atau bawang merah.

“Secara khusus, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program Bekerja memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian.

Terkait dengan efektivitas distribusi program, Kementerian Pertanian memperhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif, yang dimiliki setiap daerah. Hal ini bertujuan agar Program Bekerja bisa mewujudkan klaster ekonomi yang fokus, sehingga bisa menopang skala industri di daerah. Pada setiap klaster ekonomi dikembangkan usaha hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementerian Pertanian membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Terdapat sejumlah provinsi prioritas sebagai awal, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. “Menggunakan data yang sudah ada. Kementerian Pertanian akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian harus diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di Pusat maupun di Daerah. Keberagaman hasil penyelenggaraan kegiatan

tersebut, wajib dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja tahun 2018, maka disusun **Laporan Tahunan Badan PPSDMP**.

B. Tujuan

Penyusunan **Laporan Tahunan** bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian selama tahun 2018.

C. Output

Output laporan tahunan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP selama tahun 2018, meliputi: rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun mendatang.

BAB II

ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan PPSDMP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas fungsi Badan PPSDMP di pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian;
4. Sekretariat Badan PPSDMP.

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan terdiri atas: (a) Subbidang Program dan Kerjasama Penyuluhan; dan (b) Subbidang Evaluasi Penyuluhan;
- b. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri atas (a) Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan; dan (b) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani;
- c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri

atas (a) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan (b) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
- f. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas dari 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama Pelatihan terdiri atas (a) Subbidang Program Pelatihan; dan (b) Subbidang Kerjasama Pelatihan;
- b. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Pertanian terdiri atas (a) Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan dan (b) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan;
- c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas (a) Subbidang Standardisasi Kompetensi dan (b) Subbidang Sertifikasi Profesi.

- 3) Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
 - b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
 - f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan (b) Subbidang Kerjasama dan Tugas Belajar;
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran dan (b) Subbidang Peserta Didik; dan
 - c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Pendidikan dan (b) Subbidang Ketenagaan Pendidikan.
- 4) Sekretariat Badan PPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan PPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat Badan PPSDMP terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan terdiri atas: (a) Subbagian Program, (b) Subbagian Anggaran, dan (c) Subbagian Kerjasama;
- b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: (a) Subbagian Perbendaharaan, (b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; serta (c) Subbagian Perlengkapan;
- c. Bagian Umum terdiri atas: (a) Subbagian Hukum dan Organisasi, (b) Subbagian Kepegawaian, dan (c) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: (a) Subbagian Data dan Evaluasi, (b) Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan, dan (c) Subbagian Hubungan Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain didukung oleh 4 unit organisasi Eselon II di Pusat, Badan PPSDMP juga memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (20 Satuan Kerja/Satker) yang berlokasi di daerah. Badan PPSDMP terdiri dari 9 UPT Pendidikan Pertanian (6 UPT setingkat Eselon II, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian, dan 3 UPT setingkat Eselon IV, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri/SMK-PPN).

Selain itu Badan PPSDMP memiliki 10 unit UPT Pelatihan Pertanian (8 UPT setingkat Eselon II terdiri dari 1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/PPMKP, 7 Balai Besar Pelatihan Pertanian/Peternakan/ Kesehatan Hewan atau BBPP/BBPKH, dan 2 UPT setingkat Eselon III, yaitu Balai Pelatihan Pertanian/BPP).

Secara lengkap, masing-masing UPT BPPSDMP adalah sebagai berikut:

UPT Pendidikan Pertanian terdiri dari:

1. Polbangtan Medan Sumatera Utara (1 Satker);
2. Polbangtan Bogor Jawa Barat (1 Satker);
3. Polbangtan Magelang Jawa Tengah (2 Satker);
4. Polbangtan Malang Jawa Timur (1 Satker);
5. Polbangtan Gowa Sulawesi Selatan (1 Satker);
6. Polbangtan Manokwari Papua Barat (1 Satker);
7. SMK-PPN Sembawa Palembang Sumatera Selatan (1 Satker);
8. SMK-PPN Banjarbaru Kalimantan Selatan (1 Satker);
9. SMK-PPN Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker).

UPT Pelatihan Pertanian terdiri dari:

1. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat (1 Satker);
4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan-Malang Jawa Timur (1 Satker);
5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur (1 Satker);
6. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker);

7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan (1 Satker);
8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan (1 Satker);
9. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi (1 Satker);
10. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung (1 Satker).

Dasar hukum eksistensi kelembagaan UPT lingkup Badan PPSDMP masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 550/Kpts/ OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 367/Kpts/OT.210/6/200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 554/ Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 368/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.020/5/ 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembengunan Pertanian;
3. Keputusan Presiden Nomor: 58/2002 tentang Pendirian STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa dan STPP Manokwari, yang ditindaklanjuti dengan:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- STPP Goa;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Bogor;
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Manokwari;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Malang;
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang .
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri.

Selain di pusat dan UPT, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sumber anggaran dari DIPA Badan PPSDMP. Satuan Kerja tersebut adalah Satker Dekonsentrasi di tingkat provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di tingkat kabupaten/kota, seperti Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Kabupaten/Kota.

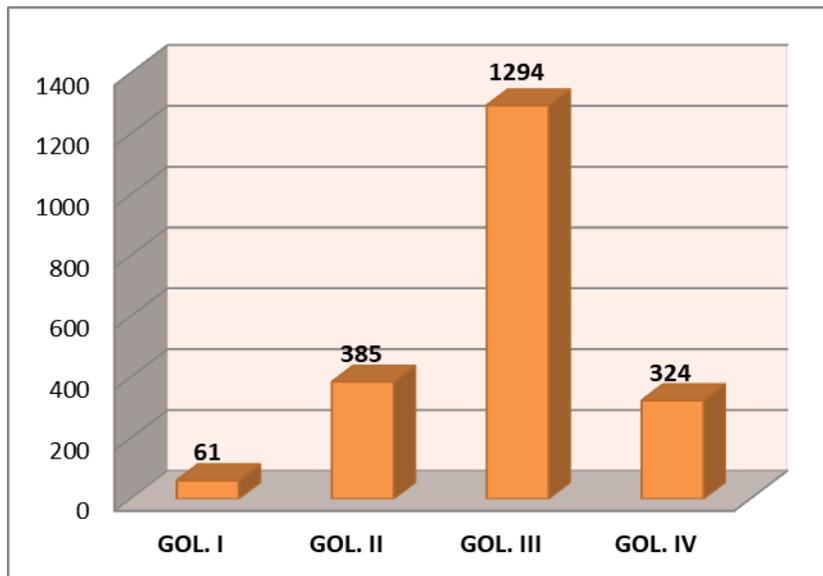
B. Keragaan Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.064 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 299 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.835 orang.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan:

1. Golongan;

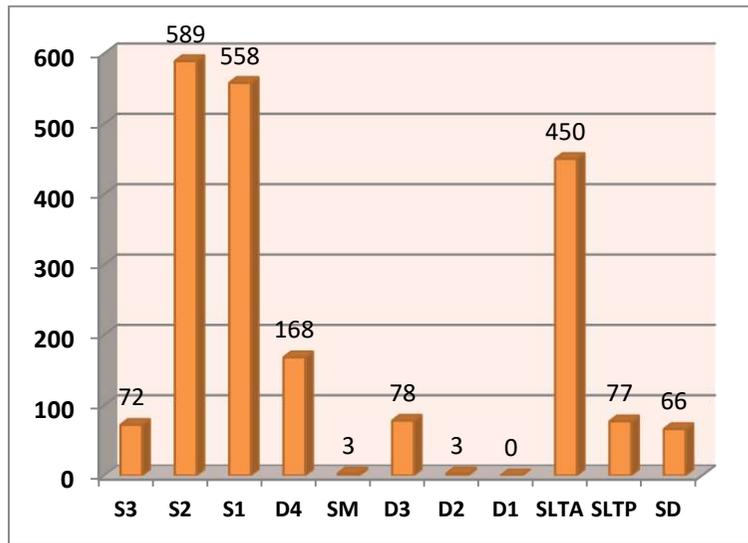
Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan terdiri atas: golongan I sebanyak 61 orang; golongan II sebanyak 385 orang; golongan III sebanyak 1.294 orang, dan golongan IV sebanyak 324 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar.1



Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan

2. Tingkat pendidikan

Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: 72 orang berpendidikan S3 (doktor), 589 orang berpendidikan S2 (magister), 729 orang berpendidikan S1/D4 (sarjana/setingkat sarjana), 81 orang berpendidikan D1-D3 (diploma), 450 orang berpendidikan SLTA, 77 orang berpendidikan SLTP dan 66 orang berpendidikan SD. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB III

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM

KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Program

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2018 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan fokus pada peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Oleh karena itu, Badan PPSDMP memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi pendidikan. Dengan fungsi ganda tersebut, tahun 2018 Badan PPSDMP mengembang 2 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Menengah Pertanian.

B. Rencana Anggaran dan Kegiatan

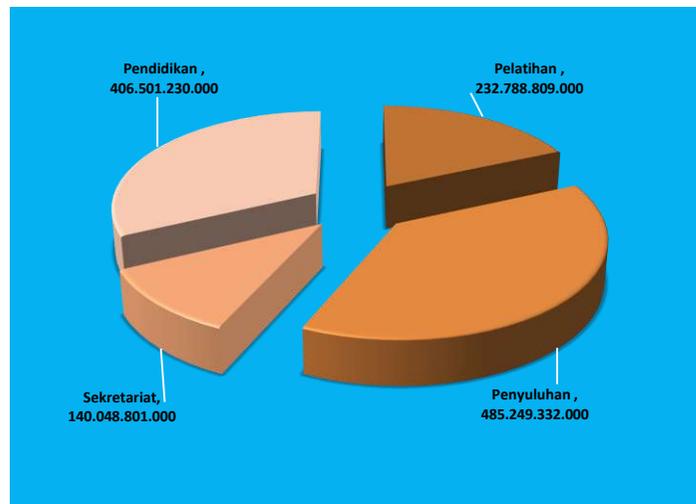
1. Alokasi Anggaran

Anggaran tahun 2018 dialokasikan dalam rangka mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP. Selain itu anggaran ditujukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018 sebesar Rp. **1.264.588.172.000,-**. Adapun komposisi anggaran berdasarkan kegiatan utama ditampilkan pada Tabel 1; jenis belanja pada Tabel 2; dan kewenangan satker pada Tabel 3.

Tabel 1.
Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama
Tahun 2018

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	232.788.809.000
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	485.249.332.000
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	140.048.801.000
4	Pendidikan Pertanian	406.501.230.000
TOTAL		1.264.588.172.000

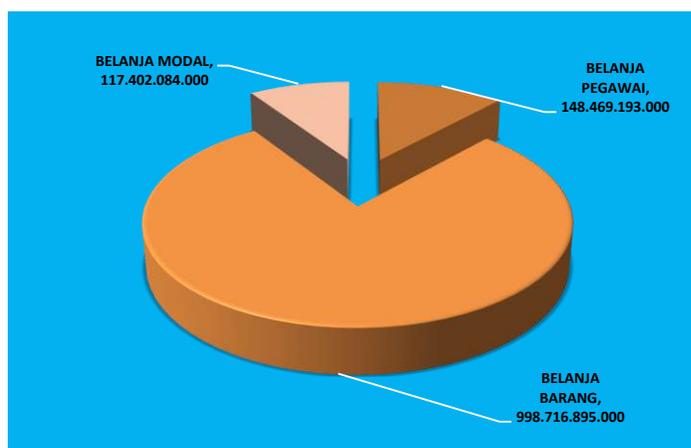


Gambar 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2018

Alokasi anggaran berdasarkan Belanja lingkup Badan PPSDM terdiri dari (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Badan PPSDMP tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel. 2 dan Gambar2.

Tabel 2.
Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2018

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	148.469.193.000
2	BELANJA BARANG	998.716.895.000
3	BELANJA MODAL	117.402.084.000
TOTAL		1.264.588.172.000

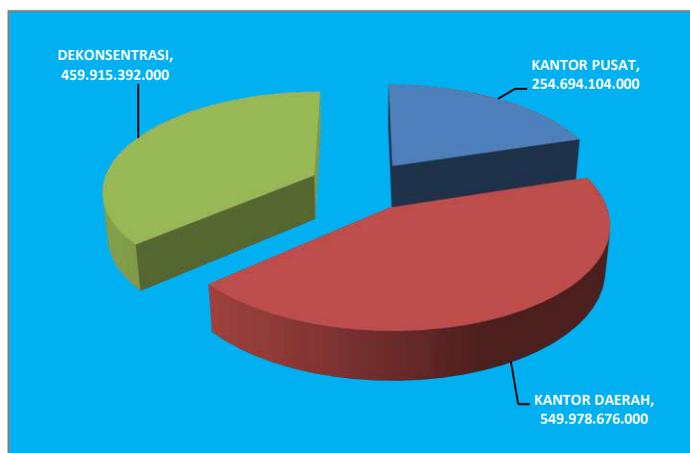


Gambar 4. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018

Alokasi anggaran berdasarkan Wewenang Satker lingkup Badan PPSDM terdiri dari (1) Kantor Pusat, (2) Kantor Daerah, (3) Dekonsentrasi, dan (4) Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Badan PPSDMP tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel. 2 dan Gambar 3.

Tabel 3.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker
Tahun 2018

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	KANTOR PUSAT	254.694.104.000
2	KANTOR DAERAH	549.978.676.000
3	DEKONSENTRASI	459.915.392.000
TOTAL		1.264.588.172.000



Gambar 5. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker Tahun 2018

2. Rencana Kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Badan PPSDMP, yaitu (a) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (b) Pendidikan Pertanian; (c) Pendidikan Menengah Pertanian; (d) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP mempunyai target sasaran pada tahun 2018. Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018 secara rinci disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Badan PPSDMP
Tahun 2018

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
A. PENYULUHAN			
1	Fasilitasi Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL-TB PP	23.192 orang	Penyuluh PNS
2	Layanan Program dan Evaluasi, Kelembagaan dan Ketenagaan, serta Penyelenggaraan Penyuluhan	12 bulan	Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluh Pertanian
B. PENDIDIKAN			
1	Fasilitasi pendidikan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidik melalui tugas belajar (orang)	300 orang	PNS Lingkup Pertanian yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tugas belajar
2	Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian (orang)	1.500 orang	Mahasiswa STPP dan Perguruan Tinggi Mitra

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
3	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani (Kelompok)	250 Kelompok	Mahasiswa STPP, Siswa SMK-PP dan Alumni Perguruan Tinggi
4	Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)	19.192 Siswa	Siswa SMK-PP
5	Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)	774 Orang	SDM Pertanian
6	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan (provinsi)	3 Provinsi	Wilayah Perbatasan
7	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan (Bulan)	12 Bulan	Layanan
C. PELATIHAN PERTANIAN			
1.	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	20.330 orang	Aparatur dan Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian, pelatihan manajemen dan kepemimpinan dan pelatihan fungsional pertanian di UPT Pelatihan Pusat
2.	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	92 unit	P4S
3.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	934 orang	Pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti pelatihan teknis pertanian dan pelatihan Sertifikasi Kompetensi

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
			Pertanian
4.	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	12 bulan	UPT Pelatihan Pusat
5.	Layanan sarana dan Prasarana Internal	12 bulan	UPT Pelatihan Pusat
6	Layanan Perkantoran	12 bulan	UPT Pelatihan Pusat
D. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA			
1.	Penyediaan dokumen Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, Keuangan dan Perlengkapan serta Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	12 bulan	dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya kegiatan kesekretariatan BPPSDMP

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

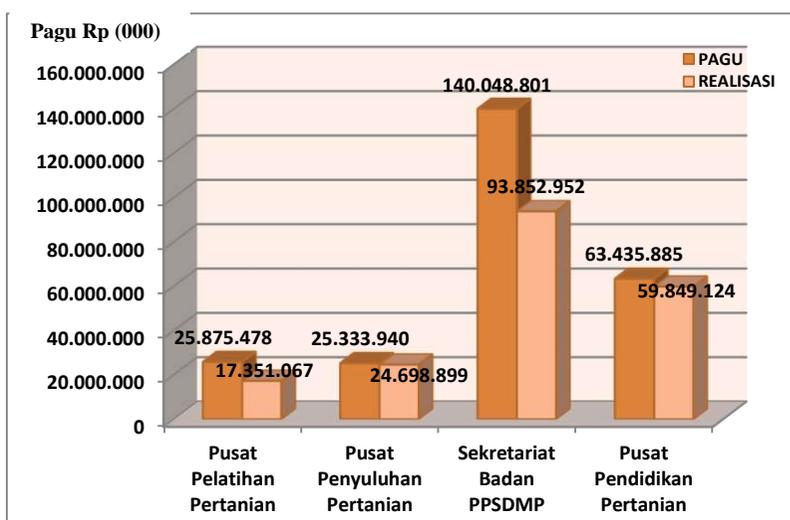
1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan PPSDMP Pusat tahun 2018 yaitu sebesar **Rp.195.752.043.395 (76,86%)** dari pagu sebesar **Rp. 254.694.104.000,-** Realisasi tertinggi terdapat pada Pusat Penyuluhan Pertanian sebesar 97,49%, secara rinci realisasi anggaran Badan PPSDMP Pusat dapat dilihat pada Tabel 5. Berikut:

Tabel 5.
Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	Pusat Pelatihan Pertanian	25.875.478.000	17.351.067.170	67,06
2.	Pusat Penyuluhan	25.333.940.000	24.698.899.120	97,49

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Pertanian			
3.	Sekretariat Badan PPSDMP	140.048.801.000	93.852.952.686	67,01
4.	Pusat Pendidikan Pertanian	63.435.885.000	59.849.124.419	94,35
	Total	254.694.104.000	195.752.043.395	76,86



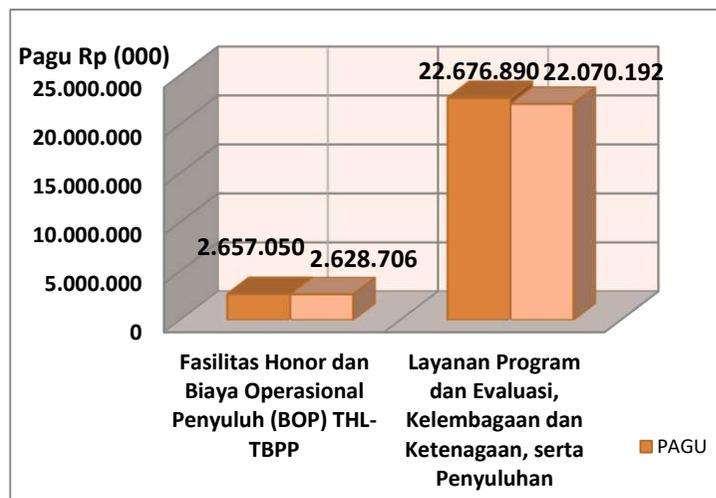
Gambar 6. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Pusat Tahun 2018

1) Pusat Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran pada Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2018 mencapai **Rp. 24.698.898.620,- (97,49%)** dari pagu sebesar **Rp. 25.333.940.000,-**. Realisasi tertinggi terdapat pada Fasilitas Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL-TBPP sebesar 98.93%, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Layanan Program dan Evaluasi, Kelembagaan dan Ketenagaan, serta Penyuluhan sebesar 97.32%. Secara rinci realiasi Anggaran Pusat Pelatihan Pertanian pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel. 6 berikut:

Tabel. 6
Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2018

NO	RENCANA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Fasilitas Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dan THL-TBPP	2.657.050.000	2.628.706.350	98,93
2	Layanan Program dan Evaluasi, Kelembagaan dan Ketenagaan, serta Penyuluhan	22.676.890.000	22.070.192.270	97,32
TOTAL		25.333.940.000	24.698.898.620	97,49



Gambar 7. Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2018

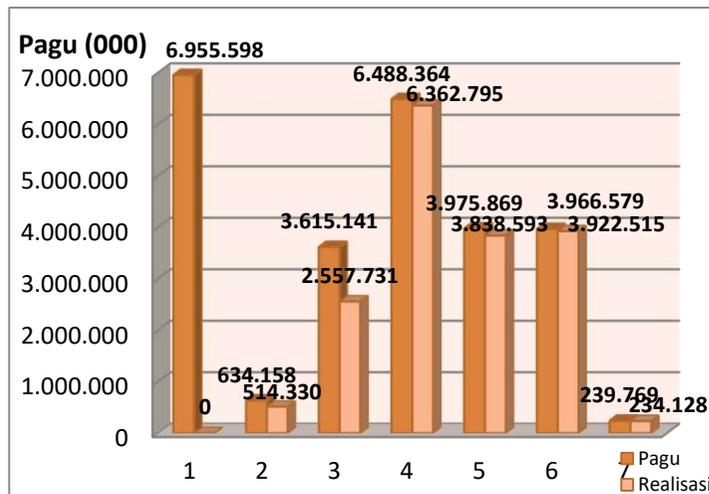
2) Pusat Pelatian Pertanian

Realisasi anggaran pada Pusat Pelatian Pertanian tahun 2018 mencapai **Rp. 17.430.093.120,- (67,36%)** dari pagu sebesar **Rp. 25.875.478.000,-**. Realisasi tertinggi terdapat pada Layanan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang dihasilkan sebesar 98.89%, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani sebesar 27,42%. Secara rinci realiasi Anggaran Pusat Pelatihan Pertanian pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel. 7 berikut:

Tabel. 7
Realisasi Anggran Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2018

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1.	Pengembangan Pertanian dan Penghidupan di Pedesaan (Village Agrikulture and Livelihoods (tahun)	6.955.598.000	0	0
2.	Pelayanan Penyuluhan, Penyediaan Saprodi, dan Pemasaran (Services, Inputs and Market Linkages)	634.158.000	514.330.000	81,10
3.	Manajemen Pengelolaan Project (Management Cost)	3.615.141.000	2.557.731.110	70,75
4.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan yang dihasilkan	6.488.364.000	6.362.795.410	98,06

5.	Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan yang dihasilkan	3.975.869.000	3.838.593.200	96,55
6	Layanan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang dihasilkan	3.966.579.000	3.922.515.300	98,89
7	Layanan Internal (Overhead)	239.769.000	234.128.100	97,65
TOTAL		25.875.478.000	17.430.093.120	67,36



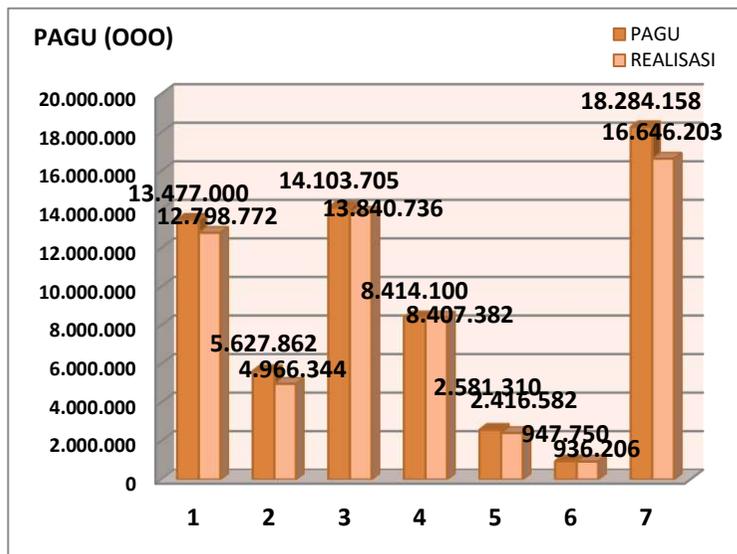
Gambar 8. Realisasi Anggaran Pusat Pelatian Pertanian Tahun 2018

3) Pendidikan Pertanian

Realisasi penyerapan anggaran Puat Pendidkan Pertanian pada tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 60.012.228.794 (94,60%)** dari pagu **Rp. 63.435.885.000**, dengan rincian realisasi per kegiatan utama ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2018

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	Fasilitasi pendidkan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidk melalui tugas belajar (orang)	13.477.000.000	12.798.772.809	94,97
2	Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian (orang)	5.627.862.000	4.966.344.811	88,25
3	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani (Kelompok)	14.103.705.000	13.840.736.109	98,14
4	Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)	8.414.100.000	8.407.382.633	99,92
5	Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)	2.581.310.000	2.416.582.605	93,62
6	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan (provinsi)	947.750.000	936.206.481	98,78
7	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan (Bulan)	18.284.158.000	16.646.203.346	91,04
TOTAL		63.435.885.000	60.012.228.794	94,60



**Gambar 9. Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan
Pertanian Tahun 2018**

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP pada tahun anggaran 2018 adalah Rp. **140.048.801.000** Anggaran pada Sekretariat Badan terbagi pada beberapa bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Evalap, Layanan Internal (*Overhead*), dan Layanan Perkantoran. Pembagian anggaran sekretariat Badan secara rinci dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel. 9
Pagu Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2018**

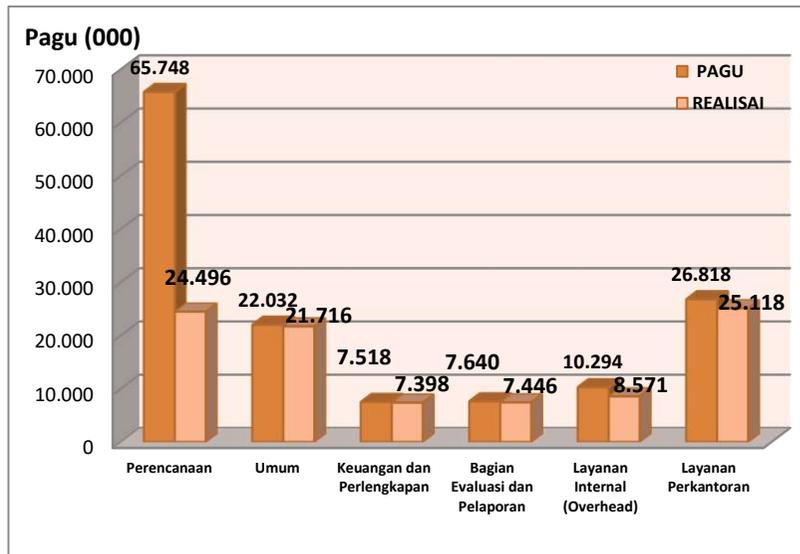
NO.	KETERANGAN	PAGU
1	Bagian Perencanaan	65.747.915.000
2	Bagian Keuangan Dan Perlengkapan	22.031.578.000
3	Umum	7.517.833.000
4	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	7.640.074.000

NO.	KETERANGAN	PAGU
5	Layanan Internal (Overhead)	10.293.730.000
6	Layanan Perkantoran	26.817.671.000
	TOTAL	140.048.801.000

Realisasi anggaran Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2018 mencapai Rp. **94.743.826.583,- (67,65%)** dari pagu sebesar **Rp. 140.048.801.000 ,-**. Realisasi tertinggi terdapat pada Bagian Umum sebesar 98,57%, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Bagian Perencanaan sebesar 67,47%. Secara rinci realiasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 10. berikut:

Tabel. 10
Realisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2018

NO.	KETERANGAN	PAGU	REALISAI	%
1	Bagian Perencanaan	23.587.915.000	15.914.024.430	67,47
2	Bagian Umum	22.031.578.000	21.715.812.567	98,57
3	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	7.517.833.000	7.397.959.803	98,41
4	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	7.640.074.000	7.445.524.728	97,45
5	Layanan Internal (Overhead)	10.293.730.000	8.571.038.454	83,26
6	Layanan Perkantoran	26.817.671.000	25.117.751.278	93,66
	TOTAL	140.048.801.000	94.743.826.583	67,65



Gambar 10. Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2018

2. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan capaian fisik dari masing-masing kegiatan kinerja kegiatan/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2018 dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana atau target.

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain:

1) Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian

Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (penumbuhan dan pengembangan KEP, sekolah lapang mendukung UPSUS di tingkat Kecamatan).



2) **Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani**

Capaian fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani didukung oleh kegiatan: (a) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani; serta (b) Pemberdayaan Petani di Sentra Produksi Pangan.



Gambar 11. Perkuat Kelembagaan Ekonomi Petani Kementan Bangun Pertanian Modern Berbasis Korporasi.

3) Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian

Fasilitasi bagi penyuluh pertanian didukung dengan kegiatan: (a) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS; (b) Honorarium dan Biaya Operasional THL-TB Penyuluh Pertanian selama 11 bulan; dan (c) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.



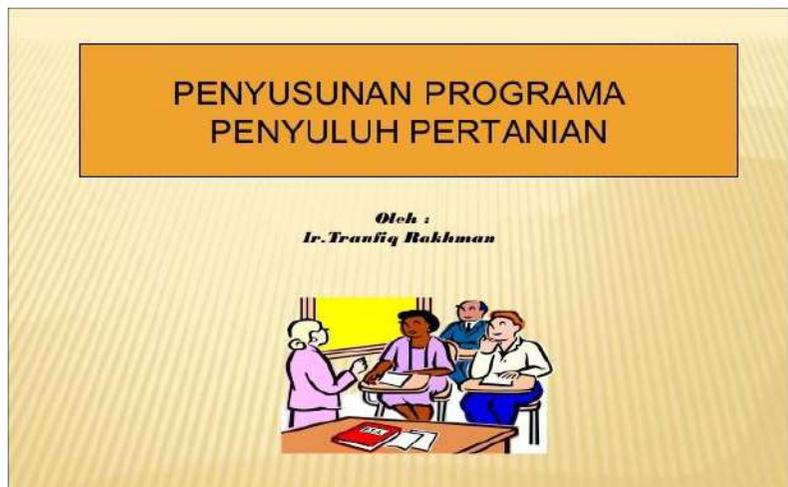
Gambar 12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dr Ir Momon Rusmono MS sedang memeberikan arahan kepada penyuluh pertanian harus disiplin berikan laporan



Gambar 13. Penyuluh Pertanian

4) Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan

Fasilitasi bagi materi penyuluh dalam bentuk kegiatan: (a) Langganan Tabloid Pertanian bagi Penyuluh Pertanian (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan); (b) Langganan Majalah Pertanian bagi kelembagaan penyuluhan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; (c) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (e) Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi.



Gambar 14. Materi Penyuluhan Pertanian

realisasi kegiatan dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11.
Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem
Penyuluhan Pertanian Tahun 2018

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Fasilitasi Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	PNS	12 bulan	12 bulan	100,00
		THL-TBPP	12 bulan	12 bulan	100,00
2	Layanan Program dan Evaluasi, Kelembagaan dan Ketenagaan, serta Penyelenggaraan Penyuluhan	12 bulan	12 bulan	100,00	

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Capaian kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

1) Pelatihan Mendukung Komoditas Strategi Pertanian, terdiri dari pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.

a) Pelatihan bagi aparatur pertanian melalui peltihan:

- (1) Peltihan dalam Jabatan (Peltihan Kepemimpinan, Peltihan Prajabatan, Peltihan Administrasi dan Manajemen, Peltihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian);
- (2) Peltihan Teknis Pertanian mendukung komoditas prioritas (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikultura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian).

b) Pelatihani bagi non aparatur pertanian meliputi pelatihan:

- (1) Peltihan Kewirausahaan;

- (2) Peltihan Teknis Pertanian mendukung komonditas prioritas;
- (3) *Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan (Agri Training Camp).*



Gambar 15 .Rapat Teknis Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2018



Gambar 16 .Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI

2) Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani

Fasilitasi kelembagaan pelatihan petani (P4S) didukung oleh kegiatan:

- (a) Penghargaan P4S Berprestasi;
- (b) Penguatan Kelembagaan;
- (c) Pemberdayaan SDM melalui Pelatihan bagi Petani di P4S.



Gambar 17 . Produksi Bawang Merah P4S Karya Nyata Kian Meningkat



Gambar 18 . Laksanakan Nawacita Presiden, Puslatan Undang P4S Berprestasi

3) Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk meningkatkan Kapasitas Petani

Pertanian merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan setandar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) standar Internasional dan standar. Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan kompetensi, untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas.



Gambar 19. Sosialisasi dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan READ-SI

4) Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan

Layanan Internal (Overhead) merupakan Fasilitas prasarana dan sarana pembelajaran kelembagaan pelatihan ditujukan pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat, yang ditujukan untuk pengembangan laboratorium, Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), dan rehabilitasi gudang.

5) Layanan Internal/ Overhead

Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan Fasilitas kegiatan operasional pada Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP), yang ditujukan untuk mendukung dan memperlancar operasional.

6) Layanan Perkantoran

Program READ-SI bertujuan untuk memperbaiki mata pencarian kaum miskin perdesaan secara berkelanjutan, adapun tujuan yang hendak di capai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam di 30 (tiga puluh) desa sasaran di provinsi Kalimantan Barat dan provinsi NTT.

Perbandingan realisasi dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Tahun 2018, disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12.
Target dan Realisasi Kegiatan
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2018

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategi Pertanian	20.330 orang	20.346 orang	100,00
2.	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	92 unit	92 unit	100,00
3.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READ-SI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	1 tahun	6 bulan	50,00
4.	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	12 bulan	12 bulan	100,00
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 bulan	12 bulan	100,00
6	Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00

c. Pendidikan Pertanian

Capaian kegiatan Pendidikan Pertanian didukung oleh kegiatan:

(1) Fasilitasi pendidikan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidik melalui tugas belajar.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 Bagi Aparatur

Pengadaan Ayam program Bekerja di Kabupaten Cirebon.



Gambar 21. POLBANGTAN

(3) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani.

Untuk mendukung kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a)

Pertemuan Koordinasi – Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (b) Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (c) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (d) Evaluasi Wirausahawan Muda Pertanian - Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (e) Pertemuan Koordinasi- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (f) Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (g) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (h) Temu Inovasi Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (i) Evaluasi Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (j) Pertemuan Koordinasi Wirausahawan Muda Pertanian - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; (k) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; (l) Penganugerahan Penghargaan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Berprestasi - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; (m) Pelaksanaan Launching Program Bekerja, Agricamp dan UPSUS Mendukung PWMP; (n) Launching POLBANGTAN Dalam Rangka Penguatan PWMP.

(4) Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP

Bantuan praktek Siswa

Untuk mendukung kegiatan Siswa yang mengikuti Pendidikan menengah Pertanian di SMK-PP dilakukan kegiatan Fasilitasi Bantuan Praktek Siswa SMK.



Gambar 22. Bantuan Praktik Siswa SMK-PP

(5) Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian.

Untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian; (b) Pelaksanaan Sertifikasi; (c) Uji Kompetensi Sertifikasi profesi SDM Bidang Pertanian; (d) Pertemuan Evaluasi ; (e) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Dosen Bidang Penyuluh.



Gambar 23. Pertemuan Dalam Rangka Persiapan Uji Kompetensi Sertifikasi Bidang Pertanian Mahasiswa

- (6) Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi melalui pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan
- Untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas pembelajaran Pendidikan Vokasi Melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah perbatasan dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan; (b) Sinkronisasi dan Supervisi Kegiatan; (c) Monitoring dan Evaluasi; (d) Workshop Hasil Kegiatan dan Pelaporan; (e) Rapat Koordinasi Praktik Kerja Lapangan Taruna STPP di Daerah Perbatasan



Gambar 24. Peran Generasi Muda dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan



**Gambar 25. Rapat Koordinasi Pengawasan/
Pendampingan Mahasiswa petani**

(7) Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan

Perencanaan, Penyusunan, Penetapan dan pemantauan Kebijakan Terkait Transformasi pendidikan pertanian dan Dukungan Pendidikan Pada program Penyuluhan

Untuk mendukung kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan dilakukan kegiatan sebagai berikut : (1) Koordinasi Teknis Pendidikan Pertanian; (2) Profesionalisme Staff; (3) Persiapan dan Perumusan Program dan Anggaran 2019; (4) Evaluasi Program Pendidikan Pertanian; (5) Penyusunan LAKIP dan LAPTAH; (6) Administrasi Pendidikan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (7) Penyusunan Jurnal Teknologi dan penyempurnaan Dokumen Profil UPT menuju Politeknik; (8) Koordinasi Pimpinan; (9) Pembinaan dan Pengawasan Program, Anggaran dan Kegiatan 2018; (10) Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Pertanian; (11) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan Pertanian Tahun 2018; (12) Penyusunan SBK Pendidikan 2019; (13) Pertukaran

Pendidik dan Tenaga kependidikan ke luar negeri; (14) Retooling (Permagangan) di perkebunan Kelapa sawit; (15) Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri; (16) Pengembangan Kerjasama luar negeri; (17) Pertukaran Guru dan Dosen ke Luar Negeri; (18) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; (19) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (20) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Perkebunan; (21) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian; (22) Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Pertanian; (23) Penyusunan Pedoman Pendidikan Tinggi Pertanian (24) Pengembangan Kurikulum Politeknik Pembangunan Pertanian; (25) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawasan Ujian dan Wisuda; (26) Dukungan Pendidikan Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Strategis; (27) Penerimaan Mahasiswa Baru; (28) Pembinaan Kehidupan Kampus; (28) Pembinaan Generasi Muda Melalui Sakatarunabumi; (29) Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian; (30) Penjaminan Mutu Pendidikan; (31) Pembinaan Penerapan Teaching Factory; (32) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru, Dosen dan PLP; (33) Magang Bagi Tenaga Pendidik Pertanian; (34) Fasilitasi Tenaga Kependidikan Dalam memperkuat Dosen Vokasi Pertanian; (35) Penguatan Penelitian Terapan Dosen Vokasi ke Arah Transformasi; (36) Fasilitasi Penguatan Dosen Vokasi se Indonesia; (37) Magang Bagi Tenaga Kependidikan; (38) Persiapan Progran YESS-IFAd; (39) Pelatihan Alsintan Wilayah Korem 074 dan Korem lainnya.



Gambar 26. Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan



Gambar 27. Siswa SMK PP N Sembawa Melakukan Bimbingan Teknis Wirausaha



Gambar 28. 67 Siswa SMK PP Negeri Sembawa Kompeten sebagai Mandor Kebun

Perbandingan realisasi kegiatan dengan target sasaran Revitalisasi Pendidikan Pertanian secara ringkas ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13.
Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Pertanian
Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Fasilitasi pendidikan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidik melalui tugas belajar (orang)	300 Orang	300 Orang	100,00
2	Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian (orang)	1.500 Orang	1.500 Orang	100,00
3	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani (Kelompok)	250 Kelompok	250 Kelompok	100,00
4	Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	19.192 Siswa	21.941 Siswa	115,00

	(siswa)			
5	Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)	774 Orang	774 Orang	100,00
6	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan (provinsi)	3 Provinsi	3 Provinsi	100,00
7	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan (Bulan)	12 Bulan	12 Buln	100,00

d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Capaian kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan penyusunan rencana dan program, (b) program kerjasama; dan (b) penyiapan penyusunan anggaran.
- 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam 3 Renstra Sekretariat Badan PPSDMP 2015 - 2019 melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); (b) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan

(c) pelaksanaan urusan perlengkapan.



Gambar 29. Program Bekerja TA 2018

- 3) Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (b) pelaksanaan urusan kepegawaian; dan (c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data-informasi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan pertanian, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan

fungsi: (a) penyiapan data, penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; (b) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan (c) penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.



Gambar 30. Rapat Pimpinan Badan PPSDMP





Gambar 31. Apresiasi Sakip tahun 2018



Gamba 32. Pemberian Penghargaan PPID Tahun 2018



Gambar 33. Pertemuan Konsolidasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018

- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP selama Tahun 2018 tersaji pada Tabel 10.

**Tabel 14.
Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2018**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	12	12	100,00
2.	Dokumen Keuangan dan Perlengkapan Yang Dihasilkan	12	12	100,00

3.	Dokumen Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga yang dihasilkan	12	12	100,00
4.	Dokumen Data dan Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan dan Perpustakaan yang dihasilkan	12	12	100,00
Total (dokumen)		12	12	100,00

Berdasarkan capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, maka dapat diketahui capaian tingkat efisiensi (rasio *output* yang dicapai dengan input/anggaran yang digunakan), baik secara global maupun secara parsial menurut masing-masing eselon II lingkup Badan PPSDMP. Tingkat efisiensi tersebut disajikan pada Tabel 15. berikut ini.

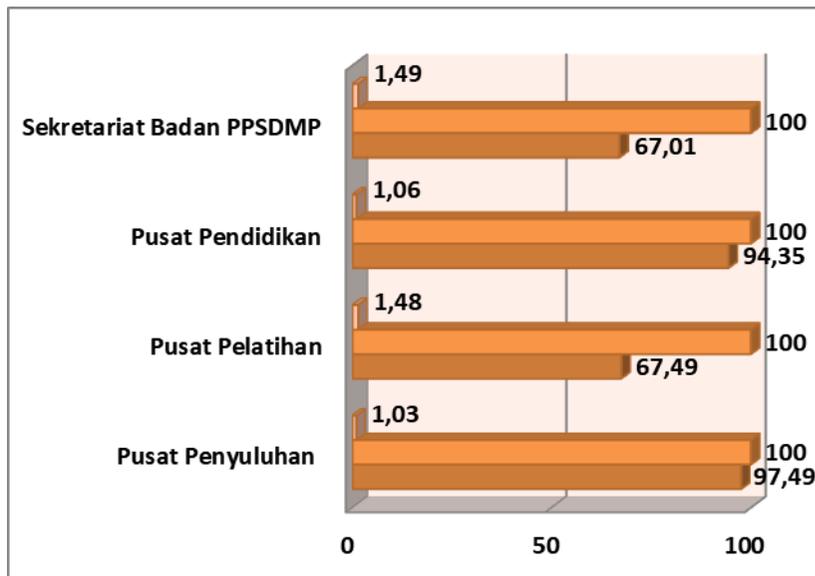
Tabel 15.
Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2018

No.	Keterangan	Realisasi Keuangan (%) (I)	Rata-rata Realisasi Fisik (%)	Tingkat Efisiensi (O/I)
1	Pusat Penyuluhan	97,49	100,00	1,03
2	Pusat Pelatihan	67,49	100,00	1,48
3	Pusat Pendidikan	94,35	100,00	1,06
4	Sekretariat Badan PPSDMP	67,01	100,00	1,49

Berdasarkan Tabel 15. diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan capaian tingkat efisiensi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup BPPSDMP pada tahun 2018 juga termasuk pada

kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu

- a. 1,03 pada kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian;
- b. 1,48 pada kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian;
- c. 1,06 pada kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian;
- d. 1,49 pada kegiatan Sekretariat Badan PPSDMP.



Gambar 17. Persentase Realisasi Keuangan dan Fisik dan Tingkat Efisiensi BPPSDMP Tahun 2018

BAB IV.

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian selama tahun 2018, permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- 1) Database jumlah penyuluh pertanian (PP PNS dan THL TB PP) dalam aplikasi Simluhtan belum sesuai dengan data jumlah penyuluh pertanian di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.
- 2) SK Penyuluh Pertanian (PP PNS dan TH-TB PP) penerima BOP belum di lengkapi dengan data wilayah kerjanya (WKPP).
- 3) Perpindahan Penyuluh Pertanian antar WKPP mengakibatkan perubahan administrasi pembayaran BOP dan honor serta terhambatnya penilaian kelas kemampuan poktan.
- 4) Rekomendasi untuk pembayaran BOP Penyuluh PNS dan THL-TB PP dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sering terlambat.
- 5) Keterlambatan laporan data CPCL kegiatan SL dari Propinsi ke Pusat.
- 6) Pelaksanaan SL di beberapa WKPP dibina/ didampingi oleh Penyuluh Pertanian yang sama karena jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah desa.
- 7) Tidak ada juklak/juknis/SOP yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan kegiatan SL di lapangan.

- 8) Fasilitasi dan sosialisasi kepada calon Penyuluh Pertanian Swadaya melalui pelaksanaan kegiatan demplot belum optimal (tujuan, sasaran yang terlibat serta output dicapai).
- 9) Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya belum sejalan dengan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes).
- 10) Keterlambatan laporan capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan Penumbuhan Penyuluh Swadaya dari Propinsi ke Pusat.
- 11) Penetapan CP/CL belum disesuaikan dengan fasilitasi yang diberikan dan output yang ditetapkan, sehingga anggaran yang dialokasikan belum efisien dan efektif.
- 12) Kurangnya kesiapan masing-masing kelembagaan petani terutama dari aspek badan hukum yang akan ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
- 13) Belum ada juklak/juknis/SOP sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi
- 14) Penyuluh Pertanian belum memahami strategi dan mekanisme kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi berbasis kawasan.
- 15) Beberapa penyuluh pertanian yang menerima fasilitas BOP belum melaporkan data perubahan skor/ peningkatan kelas kemampuan poktan.
- 16) Peran dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi belum optimal karena sebagian BPP belum menyusun SK penulis materi dan rencana materi penyuluhan yang akan di upload kedalam cyber extension serta belum optimal dalam kegiatan verifikasi dan validasi data penyuluhan pertanian.
- 17) Admin siluhtan dan penyuluh pertanian belum menguasai aplikasi Siluhtan sehingga arus pelaporan secara berjenjang belum optimal (laporan terlambat).

- 18) Admin SMIPP (Simluhtan dan cyber extension) belum memahami operasional aplikasi simluhtan dan cyber extension yang mengakibatkan proses verifikasi, validasi dan updating database ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani serta penyusunan materi penyuluhan belum optimal.
- 19) Terlambatnya Surat Keputusan (SK) Penetapan admin di BPP oleh dinas provinsi (usulan ke BPP ke Kabupaten dan Kabupaten ke Provinsi sebagai dasar untuk pembayaran honor admin).
- 20) Sebagian BPP masih keterbatasan sarana prasarana sebagai penunjang operasional BPP TIK seperti Tidak tersedia jaringan internet.
- 21) Terlambatnya laporan materi penyuluhan yang diunggah oleh BPP ke dalam website Cyber Extension.
- 22) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi karena rekomendasi teknologi belum sepenuhnya disediakan oleh BPTP.
- 23) Tidak ada juklak/juknis/SOP yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi.
- 24) Kegiatan evaluasi dan konsolidasi audit masih belum optimal.
- 25) Implementasi Inpres No. 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat belum optimal.

2. Pusat Pendidikan Pertanian

Beberapa permasalahan serapan anggaran selama pelaksanaan program dan kegiatan Pusdikan Tahun 2018 yaitu adanya revisi anggaran terkait : (1) Adanya penambahan kegiatan pada program retooling (permagangan) yang menyebabkan penambahan alokasi anggaran, 2) pemindahan anggaran Pusat

Pendidikan Pertanian ke satker UPT Pendidikan Pertanian terkait program pengabdian masyarakat dan pendampingan mahasiswa melalui PKL di kawasan perbatasan dan program pembinaan desa mitra di wilayah Sulawesi Selatan, (3) Pengalokasi anggaran untuk persiapan program Youth Empowerment and Support Services (YESS). YESS merupakan program kerjasama dengan IFAD, serta (4) Pengalokasian anggaran untuk program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)

3. Pusat Pelatihan

- 1) Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai;
- 2) Dukungan prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek) belum optimal;
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah;
- 4) Standarisasi mutu layanan kediklatan berdasarkan ISO belum terpenuhi.

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- 1) Penerapan *e-planning* dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik belum prima;
- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta pengendalian internal masih rendah;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

B. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- 1) Perlu updating data Penyuluh Pertanian di Simluhtan (PP PNS dan THL TB PP) secara rutin
- 2) SK penyuluh pertanian penerima BOP (PP PNS dan THL-TB PP) wajib dilengkapi dengan wilayah kerjanya (WKPP) sehingga output peningkatan kapasitas poktan jelas dan terukur.
- 3) Pusat Penyuluhan Pertanian bersurat kepada Dinas Pertanian yang menangani fungsi penyuluhan agar tidak dialih tugaskan ke jabatan lain yang setara guna mendukung kinerja penyuluhan pertanian.
- 4) Provinsi dan kabupaten/kota didorong membangun aplikasi untuk memantau kinerja penyuluh pertanian sehingga pembayaran BOP tepat waktu.
- 5) Bidang yang menangani ketenagaan di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara rutin melakukan updating, verifikasi dan validasi data Penyuluh Pertanian PNS kedalam aplikasi Simluhtan.
- 6) Bidang yang menangani ketenagaan di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara rutin melakukan updating, verifikasi dan validasi data THL-TB PP kedalam aplikasi Simluhtan.
- 7) Data CPCL Kegiatan Sekolah Lapangan agar disusun pada T-1 kegiatan berjalan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) sehingga tidak berubah pada saat kegiatan akan dilaksanakan.
- 8) Menempatkan Penyuluh Pertanian Swadaya sehingga WKPP yang belum ada Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB PP diisi dengan Penyuluh Pertanian Swadaya.

- 9) Perlu dibuat juklak/juknis/SOP Sekolah Lapangan yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan kegiatan SL di lapangan.
- 10) Penanggung jawab teknis kegiatan di Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota agar lebih intensif dan berkesinambungan melakukan pengawalan dan pendampingan sampai ke titik kegiatan di lapangan.
- 11) Provinsi agar menyusun Data CPCL Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya pada T-1 kegiatan berjalan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) sehingga tidak berubah pada saat kegiatan akan dilaksanakan.
- 12) Perlu dilakukan sosialisasi/bimtek kepada calon Penyuluh Pertanian Swadaya tentang tujuan, sasaran yang terlibat dan output yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan demplot.
- 13) Perlu dibuat juklak/juknis/SOP Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan kegiatan SL di lapangan.
- 14) Penanggung jawab teknis kegiatan di Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota agar lebih intensif dan berkesinambungan melakukan pengawalan dan pendampingan sampai ke titik kegiatan di lapangan.
- 15) Penanggungjawab teknis di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar menyusun strategi dan mekanisme dalam bentuk petunjuk lapangan (petlap) kegiatan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya agar sejalan dengan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes).
- 16) Penanggungjawab satker dana dekonsentrasi di provinsi segera menyelesaikan laporan kegiatan Penumbuhan dan

Pengembangan Penyuluh Swadaya dalam aplikasi Siluhtan.Net.

- 17) Penetapan CP/CL seyogyanya disesuaikan dengan fasilitasi yang diberikan dan output yang ditetapkan, sehingga anggaran yang dialokasikan efisien dan efektif (terutama calon yang belum berbadan hukum).
- 18) Perlu dilakukan bimbingan teknis kepada penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi.
- 19) Perlu dibuat Petunjuk Teknis/SOP kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi oleh bidang teknis yang menangani serta ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk lapangan (petlap) oleh provinsi dan kabupaten/kota.
- 20) Agar penanggungjawab satker dana dekonsentrasi di provinsi segera menyelesaikan laporan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi dalam aplikasi Siluhtan.Net.
Agar lebih intensif dan berkesinambungan melakukan pengawalan dan pendampingan sampai ke titik kegiatan di lapangan.
- 21) Perlu dibuat Petunjuk teknis/SOP tentang peningkatan kapasitas kemampuan kelompok oleh bidang teknis yang menangani dan ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk lapangan (petlap)/oleh provinsi dan kabupaten/kota serta segera melaporkan hasil penilaian kapasitas poktan melalui aplikasi Siluhtan.Net.
- 22) Penanggungjawab kegiatan penyuluhan memberikan peringatan/himbauan kepada Penyuluh Pertanian yang menerima BOP baik melalui surat ataupun pertemuan-pertemuan di BPP agar melaporkan peningkatan kapasitas poktan/peningkatan yang menjadi output kinerjanya.

- 23) Menempatkan Penyuluh Pertanian Swadaya sehingga WKPP yang belum ada Penyuluh nya diisi dengan Penyuluh Pertanian Swadaya dan apabila memungkinkan mengangkat honor daerah.
- 24) Peran dan fungsi Kelembagaan penyuluhan kecamatan (BPP) harus diperkuat dan tetap dipertahankan sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian.
- 25) Perlu dilakukan bimbingan teknis kepada penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan peningkatan kapasitas poktan, penyusunan materi dan informasi penyuluhan pertanian pada berbagai media.

2. Pusat Pendidikan Pertanian

Menyikapi kondisi tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah :
(1) Disiplin pelaksanaan program kegiatan dengan mengacu kepada jadwal palang yang telah ditetapkan (2) disiplin proses administrasi keuangan, sehingga cepat tercatat pada data SPAN – aplikasi SAS, (3) Percepatan proses lelang pada program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)..

3. Pusat Pelatihan Pertanian

- a. Kualitas tenaga kediklatan (Widyaiswara sebagai fasilitator, Penyuluh Pertanian PNS dan Swadaya, dosen serta praktisi) masih perlu ditingkatkan secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi, serta kemampuan penguasaan Bahasa Inggris, sehingga kemampuan mentransfer pengetahuan kepada peserta diklat lebih variatif, inovatif, dan efektif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2018;

- b. Pelaksanaan IKL dan AKL perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga diklat yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan peserta Diklat dan efektif;
- c. Kurikulum diklat perlu disesuaikan dan dipaduserasikan dengan jenis Diklat sesuai IKL dan AKL dalam mendukung peningkatan produksi 7 komoditas strategis, agar *output* dan *outcome* dapat tercapai secara efektif dan dapat diterapkan.

4. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya.

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang antisipasi dalam menghadapi adanya kebijakan penghematan;
- b. Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan PNBP pada satker Badan PPSDMP;
- c. Renstra, RKT dan PK perlu ditelaah kembali dan disinkronkan dalam LAKIP;
- d. Memperkaya analisis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memberikan penjelasan/alasan strategis faktor keberhasilan atau kegagalan dan memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan;
- e. Melakukan pemantauan PK secara periodik dan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi antara bagian yang menangani perencanaan, bagian yang menangani evaluasi dan pelaporan
- f. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup BPPSDMP dan UPT, maka direkomendasikan agar 1) Meningkatkan kinerja Tim Satlak PI; 2) Perlu adanya “*knowledge sharing*” tentang SPI dengan melibatkan narasumber dari luar seperti Tim Pembina SPI (Itjen, BPK, BPKP); 3) Perlu sosialisasi dan

- forum-forum dengan melibatkan seluruh pegawai; 4) Memasukkan kinerja satlak PI dalam kontrak kinerja pimpinan/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- g. Dalam rangka mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Auditor (Itjen, BPK, BPKP) direkomendasikan agar: (1) penelusuran kerugian negara pada satker baru melalui forum pertemuan dengan pendampingan Itjen Kementan dan BPKP Pusat; (2) mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memfasilitasi penyelesaian temuan Kerugian Negara pada Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang sulit ditindaklanjuti; (3) pembinaan melalui kegiatan kunjungan pada satker yang terdapat temuan yang belum tuntas; (4) membuat surat edaran Kepala Badan kepada pimpinan satker tentang temuan – temuan baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat segera menindaklanjuti hingga tuntas; (5) sosialisasi ke satker tentang peraturan jangka waktu penyelesaian hasil pemeriksaan; (6) memberikan saran ke satker lingkup Badan PPSDMP tentang penetapan sanksi administrasi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 kepada penyebab kerugian negara atau instansi dan pimpinan satkernya yang tidak mau membantu/berupaya untuk penagihan atau penyelesaian kerugian negara tersebut.
- h. Dilakukan pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup Badan PPSDMP secara periodik, dimulai dengan penetapan dan pengukuhan Satlak, sosialisasi maturitas, dan gratifikasi, supervisi dan pembinaan;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan realisasi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran kegiatan Badan PPSDMP pada Pusat Pelatihan dan sekretariat Badan PPSDMP tahun 2018 tidak tercapai dengan maksimal dikarenakan antara lain pada:

- 1) **Pusat Pelatihan**

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI realisasi rendah dikarenakan kegiatan baru mulai efektif dilaksanakan mulai awal Agustus 2018. Pengadaan Konsultan untuk pengelolaan Program READSI masih dalam tahap proses pengadaan di ULP untuk mencari calon konsultan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Akan dilakukan review terhadap teknis perekrutan konsultan di tahun 2019.

- 2) **Sekretariat Badan PPSDMP**

Realisasi rendah dikarenakan ada pagu sebesar Rp.6.295.681.000 di blok untuk sub komponen kegiatan Anggaran penyesuaian tunjangan kinerja Badan PPSDMP. Selain itu pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, sekitar 60% anggaran PHLN untuk pengadaan konsultan, belum semuanya pengadaan Konsultan Internasional dan Konsultan Firma terealisasi. Pengadaan konsultan juga harus melalui ULP Kementan dan persetujuan (NOL) dari IFAD, akan dilanjutkan di tahun 2019.

Secara parsial berdasarkan kegiatan, realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Pusat Penyuluhan sebesar **97,49%**, dan realisasi yang terendah dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDMP sebesar **92,32%**.

2. Rata-rata realisasi fisik kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, secara keseluruhan mencapai **100,00%**.

No.	Keterangan	Realisasi Keuangan (%) (I)	Rata-rata Realisasi Fisik (%)	Tingkat Efisiensi (O/I)
1	Pusat Penyuluhan	97,49	100,00	1,03
2	Pusat Pelatihan	67,49	100,00	1,48
3	Pusat Pendidikan	94,35	100,00	1,06
4	Sekretariat Badan PPSDMP	67,01	100,00	1,49

3. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan (anggaran) yang dicapai, maka capaian tingkat efisiensi kegiatan Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2018 tergolong efisien dengan nilai rasio lebih dari 1, yakni **1,049**. Secara parsial berdasarkan masing-masing unit kerja, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup Badan PPSDMP pada tahun 2018 juga termasuk kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu masing-masing (a) 1,03 pada kegiatan pusat Penyuluhan; (b) 1,48 pada kegiatan Pusat Pelatihan; (c) 1,06 pada Pusat Pendidikan; dan (d) 1,46 pada kegiatan Sekretariat Badan PPSDMP.
4. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018 meliputi: tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena perencanaan anggaran kurang cermat; belum dapat mengidentifikasi dengan baik terkait dengan rapat-rapat koordinasi; adanya efisiensi

proses pengadaan; serta terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena waktunya di akhir, sehingga tidak cukup untuk pengurusan administrasi.

B. Saran

Perbaikan ke depan sebagai langkah antisipasi menyikapi permasalahan yang terjadi di tahun 2018 antara lain:

1. Lebih cermat dalam proses perencanaan (lokasi, SDM);
2. Lebih cermat dalam memperkirakan kegiatan yang bersifat koordinasi baik internal maupun eksternal;
3. Lebih cermat dalam merancang kegiatan pengadaan dan menepati jadwal proses pengadaan, lebih disiplin baik lokasi maupun waktu pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih dalam penjadwalan kegiatan antar bagian lingkup BPPSDMP;
5. Lebih selektif dalam mengundang peserta; lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga;
6. Lebih intensif dalam pengendalian internal.

BAB VI

PENUTUP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian memiliki fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Tahun 2018, fungsi tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Program Pendidikan Menengah Pertanian. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (4) Pusat Pendidikan Pertanian; serta (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, secara menyeluruh mencapai 76,86%, yaitu sebesar Rp 1195.752.043.395,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp 254.694.104.000,-

Pencapaian realisasi fisik kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018 adalah sebesar pada kisaran 97,49% - 100.00% Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2018 dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut. Hal hal yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian mendatang.

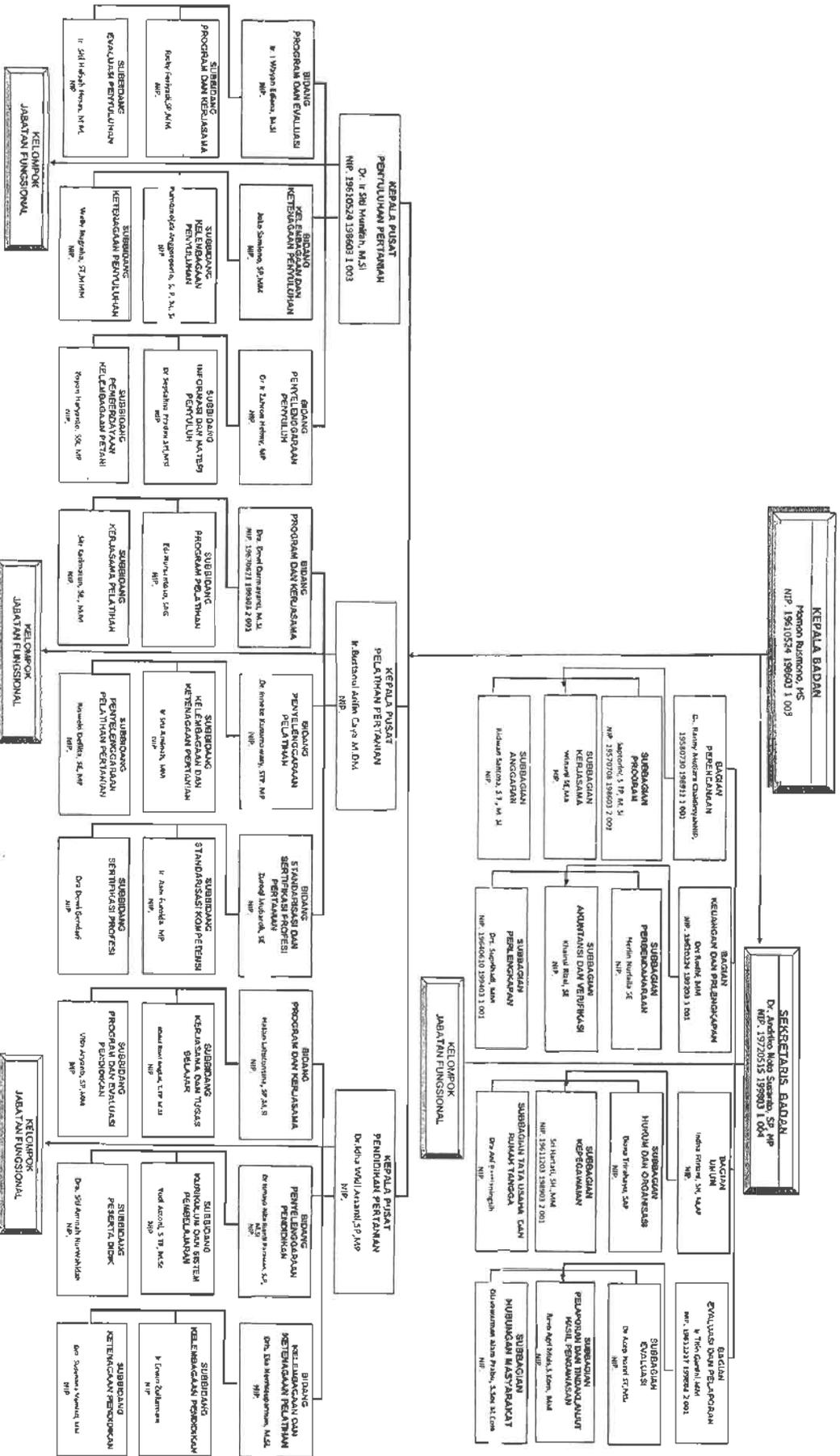
LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP

Lampiran 2. Data Kepegawaian Badan PPSDMP

Lampiran 3. Data Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2010**





**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan										Jumlah	
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP		SD
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	32	47	2	-	9	-	-	-	-	-	139
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	5	21	37	-	-	1	-	-	-	-	-	73
4	Pusat Pendidikan Pertanian	3	11	20	2	-	1	-	-	-	-	-	41
5	Pusat Pelatihan Pertanian	2	15	16	-	-	3	-	-	-	-	-	45
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	4	39	21	-	-	2	1	-	-	-	-	159
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	4	31	17	2	-	4	-	-	-	-	-	76
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	13	41	18	16	-	4	-	-	-	-	-	144
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	12	51	45	33	1	6	2	-	-	-	-	200
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	12	47	18	18	1	8	-	-	-	-	-	149
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	5	41	18	20	-	3	-	-	-	-	-	94
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	1	24	15	11	-	2	-	-	-	-	-	60
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	1	37	37	3	1	5	-	-	-	-	-	108
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	20	20	4	-	4	-	-	-	-	-	69
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	25	23	9	-	5	-	-	-	-	-	88
16	Balai Besar Pelatihan Peternakan Ketindan	3	26	24	9	-	5	-	-	-	-	-	85
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	24	32	2	-	1	-	-	-	-	-	81
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	1	14	19	4	-	1	-	-	-	-	-	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	1	13	17	6	-	3	-	-	-	-	-	62
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	1	19	24	11	-	1	-	-	-	-	-	78
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	18	25	-	-	4	-	-	-	-	-	61
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	1	17	30	4	-	4	-	-	-	-	-	80
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	12	22	3	-	2	-	-	-	-	-	56
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	11	13	9	-	-	-	-	-	-	-	51
TOTAL		72	589	558	168	3	78	3	450	77	66	2.064	

Jakarta, Desember 2018
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Siti Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2018

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	83	56	139
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	34	39	73
4	Pusat Pendidikan Pertanian	18	23	41
5	Pusat Pelatihan Pertanian	20	25	45
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	108	51	159
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	39	37	76
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	99	45	144
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	129	71	200
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	110	39	149
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	62	32	94
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	39	21	60
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	66	42	108
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	45	24	69
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	59	29	88
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	51	34	85
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	55	26	81
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	45	19	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	39	23	62
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	52	26	78
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	38	23	61
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	54	26	80
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	38	18	56
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	41	10	51
TOTAL PEGAWAI BPPSDMP		1,325	739	2,064



Jakarta, 31 Desember 2018
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PECAWAJ BADAJ PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Unit Kerja	Golongan																				Jml					
		I					II					III					IV										
		a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	e		Total				
1	Badan PSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cragara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batanguluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		40	21	61	65	59	171	90	385	262	378	328	326	1.294	150	82	56	27	9	372	2.064						

Jakarta, Desember 2018
Kepala Bagian Urutur
Kelembagaan Subbagian Kepegawain

S.H.Hakati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001